

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum)

SKRIPSI



Oleh

Octaria Hawa Kirana

NIM. C03214013

**UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AMPEL
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octaria Hawa Kirana
NIM : C03214013
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Dum)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Octaria Hawa Kirana

NIM. C03214013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Octaria Hawa Kirana NIM. C03214013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Octaria Hawa Kirana NIM. C03214013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H.Ah.Fajruddin Fatwa, S.Ag, SH, MHI, Dip.Lead.
NIP.197606132003121002

Penguji II,



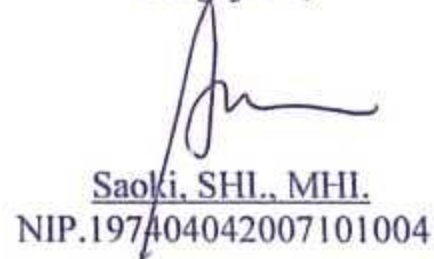
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.
NIP.196803292000032001

Penguji III,



Siti Rumilah, M.Pd.
NIP.197607122007102005

Penguji IV,



Saoki, SHL., MHI.
NIP.197404042007101004

Surabaya, 10 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Octaria Hawa Kirana
NIM : C03214013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : octariahawakirana95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur (Studi Putusan No. 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis



Octaria Hawa Kirana
C03214013

ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum)”. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan beberapa karya tulis yang membahas tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang jelas dalam hal ini Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur yang kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

Penelitian skripsi ini menemukan bahwa pada pertimbangan hukum hakim lebih menitikberatkan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 332 ayat (1) KUHP sebagai *lex generalis* dibanding menerapkan *lex specialis* yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Menurut tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi/ hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai karena termasuk dalam kategori hukuman takzir dan belum ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman kejahatan pada putusan tersebut, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini ulil amri.

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan kepada para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih memperhatikan asas *lex specialis derogat lex generalis* sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam	19
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif	21
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
1. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif	26
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
1. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif	32
D. Sanksi Tindak Pidana	34
1. Sanksi Tindak Pidana dalam Hukum Islam	34
2. Sanksi Tindak Pidana dalam Hukum Positif	37

BAB III TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum

A. Deskripsi Kasus.....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim	50
C. Amar Putusan	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

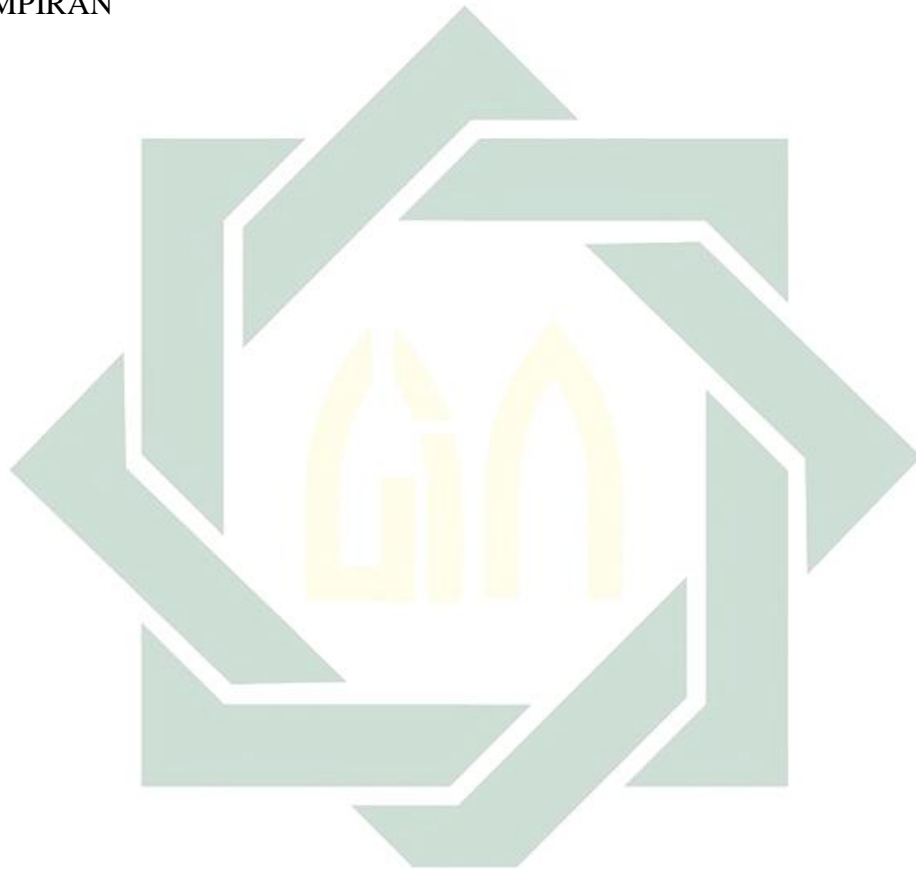
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur Menurut KUHP.....	58
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Paul Mudigdo Moeliono mengungkapkan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang telah melanggar norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Cara untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah dengan menuangkannya dalam aturan hukum pidana yang disertai dengan ancaman hukuman.¹

Kejahatan terhadap anak-anak bukanlah hal yang asing bagi kita, berbagai contoh kejahatan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita temui. Anak banyak menjadi korban dari kejahatan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

Pengaturan hukum pidana dari berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

¹ Ninik Widiati, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 29.

Perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus...*, 107.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dikenai hukuman takzir. Untuk menentukan jenis dan ukuran sanksinya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁶

⁵ Ibid., 10.

[illegible]

Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁷

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- ⁸ Arip Semboda, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/PN.BKL)*, No. 1, Vol. 1, (April, 2016), 70.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- ### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- [illegible]

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹

Proses kajian pustaka menemukan bahwa kajian ini bukanlah kajian yang baru, ada beberapa kajian yang berhasil ditemukan, yaitu sebagai berikut :

1. Karya Ilmiah (skripsi) Mustakhim Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus Nomor 9/Pid.B/2012/PN.Mojokerto)” yang pada intinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal 332 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara

[illegible]

Dalam putusan tersebut, penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 332 ayat (1) KUHP dibanding menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- ¹² Prita Nasiti Trisianti, “Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan Perempuan (Putusan MA No. 464 K/Pid/2006),” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 12.

1. Aspek keilmuan (teoritis)

2. Aspek terapan (praktis)

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan peneliti bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.¹³

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Dalam hal ini meliputi :

Data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum).

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan,

[illegible]

catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN. Dum yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :

1. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
2. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
3. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
4. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

¹⁶ Ibid., 23.

[illegible]

dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.¹⁹ Selanjutnya peneliti menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor 497/ Pid.Sus/2014/PN.Dum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat teori tentang tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum tentang

¹⁹ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71 .

tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan hakim.

Bab keempat menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

Mawardi adalah:²

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau takzir.

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits.³

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih *jinayah* sama dengan hukum pidana.⁴

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada pengertian di atas, bahwa yang dimaksud adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Selanjutnya Islam menganggap sebagian

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

Pengertian tentang tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam Belanda dengan demikian juga Hindia Belanda (KUHP), dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah.⁵

- ⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta, Refika Aditama, 2011), 97.

- Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang untuk diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁸

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003), 1.

a. *Ar-rukn as-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang atau nash)

b. *Ar-rukn al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya muallaf)

¹² Makhrus Munajat, *Transformasi...*, 20.

¹³ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 11.

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana itu terjadi.¹⁵

Pada delik pencurian perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri, barang ada ditempat penyimpanan, pencurian tidak dilakukan dimana ada unsur syubhat serta barang yang dicuri mencapai satu nisab. Sedangkan unsur-unsur khusus yang ada pada jarimah **hirabah** (penyamunan atau pencurian dengan kekerasan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata, dan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Maka

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1967), 36.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam dan berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- Perbuatan
- Dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

¹⁶ Makhrus Munajat, *Transformasi...*, 22.
¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, 79.

a. Jarimah Hudud

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua *jarimah*, baik hudud, kisas, maupun *diyat*, sebab sanksi secara keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'.²³ Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.²⁴

²¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 13.

²² Makhrus Munajat, *Transformasi...*, 26.

²³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.

²⁴ Ibid., 27.

b. Jarimah Kisas *Diyat*

Kisas *diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa) atau hukum *diyat* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.

- 1) Kisas karena melakukan jarimah pembunuhan
- 2) Kisas karena melakukan jarimah penganiayaan

²⁷ Reza Fajri Hidayat, “*Fiqh Jinayah: Jarimah Qisas dan Diyat*” dalam <http://rezafajrihidayat.blogspot.co.id/2015/06/fiqih-jinayah-jarimah-qishash-dan-diyat.html>, diakses pada 03 Mei 2018.

c. Jarimah Takzir

Para fuqaha mengartikan jarimah takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia serta mempunyai tujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku jarimah dan mencegahnya untuk tidak mengulangi melakukan jarimah lagi.

²⁸ Annisa Wally, “Perbedaan antara Jarimah Hudud, Jarimah Qisas/Diyat, dan Jarimah Ta’zir”, dalam <http://annisawally208.blogspot.co.id/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html> diakses pada 04 Mei 2018.

- Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,

Ahli lain yang bernama Ibn Hammam dalam Fathul Qadir menyatakan bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).³³

Dengan demikian, tujuan pokok hukuman menurut para ahli adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka agar terhindar dari *mafsadah*.

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 26.

2. Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan dalam Hukum Positif

Dalam KUHP tindak pidana melarikan perempuan diatur dan diancam dalam pasal 332 ayat (1) yang berbunyi “barangsiapa membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.³⁷

Tindak pidana melarikan perempuan juga diatur dan diancam di luar KUHP sebagai aturan khusus atau *lex specialis*

³⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 35.

yaitu pada pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁸

Jadi menurut KUHP yaitu pasal 332 ayat (1), hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, *Pasal 82 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

BAB III

TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR

497/PID.SUS/2014/PN.DUM

A. Deskripsi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/ PN.Dum adalah putusan yang menjelaskan tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Putusan ini memiliki Nomor putusan 497/Pid.Sus/2014/ PN.Dum, dalam putusan disebutkan perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku yaitu Hamida alias Midun Binti Budiman yang berumur 20 tahun (04 Juni 1994), beralamatkan di Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur kec. Bukit Kota Dumai, beragama Islam dan pekerjaannya adalah seorang pedagang.¹

Selain menceritakan tentang pelaku perbuatan pidana, putusan juga menyebutkan secara nyata korban tindak pidana. Korban tindak pidana yang terdapat dalam putusan tersebut adalah Salmah Binti Ajit Basri yang masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun, lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1472032201140003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman adalah membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa yaitu saksi Salmah Binti Aji Basri. Awal mula kejadian tersebut ketika terdakwa Hamida menginap di rumah korban Salmah di Jl. Mataram RT 009 Kec. Bukit Kapur Kota Dumai. Terdakwa tidur sekamar dengan korban, kemudian terdakwa membujuk dan merayu korban lalu melakukan perbuatan cabul dengan cara melepaskan celana dalam milik korban, setelah itu terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina korban secara berulang kali selama 30 (tiga puluh) menit hingga dari kemaluan korban mengeluarkan cairan berwarna putih.²

Kejadian ke-2 masih di bulan agustus 2014 sekitar pukul 11:00 Wib terdakwa menelepon korban untuk menyuruh main ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban yang hanya beda RT saja. Kemudian pada pukul 14:00 Wib terdakwa langsung mengajak korban ke kamarnya kemudian terdakwa mengatakan pada korban “buka baju dik” lalu korban mengatakan “tidak mau” kemudian terdakwa menarik baju korban dan membuka baju korban lalu terdakwa mencium bibir dan leher korban setelah itu membuka bra, kemudian memegang dan menciumi payudara korban sehingga bagian payudara korban memerah.

Kejadian ke-3 yaitu pada hari Selasa bulan September 2014 pada pukul 20:30 Wib di Jl Kebun Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur. Awalnya

² Lembar putusan hal. 4.

terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor, bermaksud melihat konser di depan BRI Sukaramai, tetapi ternyata korban diajak dan dibawa ke Jl Kebun yang sepi, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memegang payudara korban di atas motor, lalu membuka kancing celana korban dan memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina Korban secara berulang-ulang selama 1 (satu) menit.³

Kejadian ke-4 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 11:00 Wib, terdakwa menelepon korban “nanti malam kita pergi” lalu korban menjawab “kemana” lalu dijawab oleh terdakwa “udah ikut saja nanti sampai sana adik tau” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah”, kemudian sekitar pukul 22:00 Wib, terdakwa menelepon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik sudah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang”, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 sekitar pukul 01:00 Wib, terdakwa menjemput korban berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Beat.

Sesampainya disana, terdakwa bersama korban beristirahat di kamar bibi terdakwa, kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji tidak akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dalam korban lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina korban selama 3 (tiga) jam.

³ Lembar putusan hal. 5.

Adapun dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, terdakwa melakukan perbuatan menciumi payudara saksi korban sehingga memerah dan terdakwa membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara bergantian dan berulang-ulang ke dalam vagina saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban sehingga dari kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan berwarna putih.

Atas perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:⁴

1. Menyatakan terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

⁴ Lembar putusan hal. 2.

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
 - d. 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
 - e. 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam
 - f. 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
 - g. 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem
 - h. 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem,
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Majelis hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan, menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Namun, ada tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai

pada tahapan tersebut, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁵ Adapun para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi I: Salmah Binti Ajit Basri

Saksi korban mengatakan mengenal terdakwa, karena saksi korban dan terdakwa mempunyai hubungan yang akrab. Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa lari saksi ke rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa menjemput saksi korban untuk dibawa lari ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sesampainya disana, terdakwa bersama saksi korban istirahat di kamar

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2014), 239.

bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dan melakukan perbuatan cabul.

b. Saksi II : Amnah Binti Sahyan (Alm)

Saksi mengenal saksi Salmah karena saksi adalah ibu atau orang tua dari saksi korban (Salmah). Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014 anaknya (saksi Salmah) sudah tidak ada lagi di rumah saksi, terdakwa menjemput Salmah dari rumah saksi tanpa meminta izin kepada saksi selaku orang tua dari Salmah untuk membawa Salmah pergi ke Tebing Tinggi.⁶

c. Saksi III : Ajit Basri Bin Jainudin

Saksi adalah ayah dari saksi korban yang bernama Salmah yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014, ia dan isteri saksi mencari Salmah setelah mengetahui bahwa anaknya sudah tidak ada di dalam kamarnya. Saksi juga menerangkan bahwa ia pernah ditelepon oleh saksi Rubiah Binti Budiman yang mengatakan bahwa anak saksi berada dirumahnya di Tebing Tinggi.

d. Saksi IV : Rubiah Binti Budiman

Saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah kakak dari terdakwa. Saksi menerangkan bahwa ia mendapat informasi tentang terdakwa dan saksi Salmah yang berada di rumah bibi saksi di Tebing

⁶ Lembar putusan hal. 10.

Tinggi, Kab. Serdang Bedagai. Dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan bapak saksi bernama Budiman berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjemput terdakwa.

Sesampainya disana, saksi menemukan terdakwa dan Salmah di rumah bibi saksi. Pada malam harinya, saksi dan bapak saksi membawa terdakwa dan saksi Salmah ke Dumai dengan menggunakan bus Halmahera yang tiba di Dumai pada hari Kamis tanggal 25 September 2014.

2. Alat bukti surat

Suatu alat bukti yang berupa surat harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam bentuk surat resmi. Hal ini terdapat dalam Pasal 187 KUHP:⁷

1. Berita acara surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: akta notaris, akta jual beli oleh PPAT.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

⁷ Hendrasanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 254-255.

yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh: ktp, paspor.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya visum et repertum.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh: surat-surat dibawah tangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti surat dalam kasus ini berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri.⁸

3. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain, yang menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014,

⁸ Lembar putusan hal. 15.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buana Press: 2014, 243.

terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur terhadap korban Salmah binti Ajit Basri. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

4. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁰ Dalam kasus ini, terdakwa mengaku bahwa ia telah melarikan perempuan tanpa seizin dari orang tua atau wali korban. Setahu terdakwa, korban (saksi Salmah) sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan terdakwa mengaku bahwa ia dan saksi Salmah mempunyai hubungan dekat atau berpacaran.

5. Barang bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun barang bukti dijelaskan dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti yaitu:¹¹

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana

¹⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 104.

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana...*, 266.

d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
- 2) Satu lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
- 3) Satu unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
- 4) Satu helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
- 5) Satu helai celana panjang merk Zara man warna hitam
- 6) Satu helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
- 7) Satu helai BH bertuliskan roni nice warna krem
- 8) Satu helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem.

Isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Hamida alias Midun binti Budiman telah melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur terhadap korban Salmah binti Ajit Basri dan karena perbuatannya, ia dituntut

oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur adalah:

Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat di dalam surat Dakwaan dengan Register Perkara Nomor: 513/ Pid.B/ 12/ 2014.

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Amnah Binti Sahyan (Alm), saksi adalah ibu korban
- b. Saksi Ajit Basri Bin Jainudin, saksi sebagai bapak korban

c. Saksi Rubiah Binti Budiman, saksi sebagai kakak dari pelaku/terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 01:00 Wib, terdakwa menjemput korban berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam Nopol BM 4223 RU. Sesampai di Tebing Tinggi, terdakwa bersama korban istirahat di kamar bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk korban kemudian melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.

Majelis Hakim sependapat dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan alternatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua. Oleh karena itu, majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan kedua pasal 332 ayat (1) KUHP memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Barang siapa

Unsur ke satu “barang siapa” dalam perkara ini yang dimaksud adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka sebagai subyek hukum yang dapat

¹² Ibid., 18.

mempertanggungjawabkan dalam kasus ini adalah Hamida alias Midun Binti Budiman. Dengan demikian, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

2. Membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya.

Pada kasus ini yang dimaksud dengan unsur kedua, “membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan persetujuannya” adalah membawa pergi wanita tanpa meminta izin kepada orang tua atau walinya.

Berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah melarikan wanita dengan mengucapkan janji-janji dan bujuk rayu kepada korban Salmah yang merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka pencapaian tujuan terdakwa untuk dapat membawa pergi korban.

Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawa korban ke rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai selama 7 (tujuh) hari. Selama terdakwa melakukan pelarian terhadap korban, tidak ada usaha dari terdakwa untuk memberi kabar keberadaan korban kepada orang tua atau

walinya. Dengan demikian, yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Unsur ketiga, “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan” adalah menjadikan kepemilikan wanita tersebut dalam kekuasaannya. Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat diketahui bahwa setelah tiba di Serdang Bedagai, terdakwa dan korban beristirahat di kamar bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Salmah.

Selama di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, terdakwa Hamida melakukan perbuatan tersebut kepada korban Salmah. Dan dengan demikian, yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban secara pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya, dan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pembedaan, maka atas tindak pidana yang

dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa, yang memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan meyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma pada diri saksi Salmah Binti Ajit Basri

b. Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

b) Terdakwa belum pernah dihukum

C. Amar Putusan Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum

Mengingat dan memperhatikan pasal 332 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang

berkenaan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:¹³

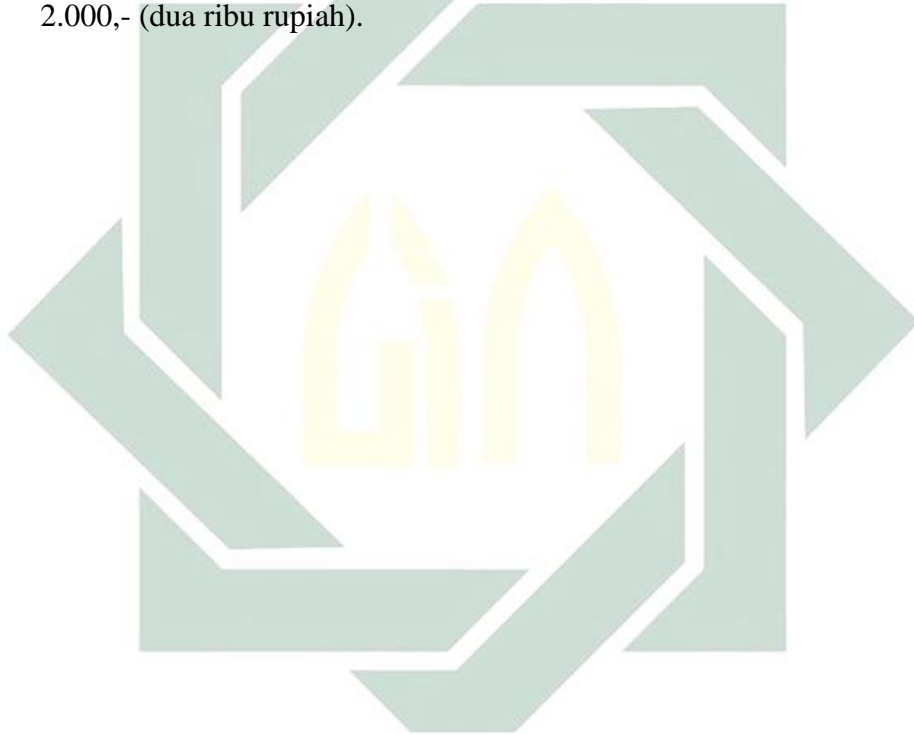
1. Menyatakan terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
 - d. 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
 - e. 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam

¹³ Lembar putusan hal. 22.

- f. 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
- g. 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem
- h. 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
497/Pid.Sus/2014/PN.Dum TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum Menurut KUHP

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²

Hakim bebas memutus perkara pidana yang sedang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim

¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Trimenhukumbloganda.blogspot.com/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html?m=1 diakses pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 22.28.

dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi (hukuman) bukanlah tanpa batas, karena tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan dalam undang-undang.³

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional. Suatu putusan hakim itu harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁴ Sebuah putusan di harapkan dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, yakni dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sebelum hakim memutus perkara haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, dari segi undang-undang, alat bukti, saksi-saksi, pengakuan pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan fakta-fakta hukum di persidangan.

³ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014), 24.

Mengenai tindak pidana melarikan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum yaitu sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Hamida alias Midun Binti Budiman pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 September 2014 melarikan Salmah yang masih berumur 16 (enam belas) tahun ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa meminta izin dari orang tua saksi Salmah.

Dalam penelitian ini, bertujuan dan fokus pada analisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan Dumai. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁵

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

⁵ R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-undang..., 125.

Maksud dari unsur “fakta dan keadaan” disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.⁶

Pertimbangan yang dijadikan acuan hakim dalam memutus perkara ini ada banyak, yaitu meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, alat bukti, barang bukti, saksi-saksi, serta unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang yang digunakan sebagai pijakan dalam memutus perkara.

Dalam menjatuhkan putusan ini hakim memakai pasal yang berada dalam KUHP yaitu pasal 332 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Menurut hakim pasal tersebut sudah sesuai dan unsur-unsur di dalamnya tepat dengan kasus kronologi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Akan tetapi dari beberapa uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam menjadikan dasar pertimbangan hukum, majelis hakim tidak berpedoman pada *asas lex specialis derogat lex generalis* yaitu dengan tidak menjadikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, 289.

Anak sebagai dasar memutuskan perkara, padahal sudah dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 332 ayat (1) KUHP. Namun, penulis berpendapat bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur “perbuatan cabul” terhadap anak korban dalam melakukan tindak pidana melarikan perempuan tersebut.

Unsur tersebut sudah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa setelah terdakwa melarikan korban, terdakwa membujuk dan merayu anak korban kemudian melakukan perbuatan cabul. Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat peneliti berkeyakinan bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pada pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan pada pasal 332 ayat (1) KUHP seperti pada dakwaan kedua alternatif Jaksa Penuntut Umum. Faktanya, majelis hakim lebih memilih menggunakan pasal 332 ayat (1) KUHP meskipun sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih disebut “*jarimah* atau *jinayah*”. Adapun definisi dari istilah *jarimah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:⁷

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَلْحَظُورَاتٌ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مَّنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَّأْمُورٍ بِهِ

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang digali dan disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab) dan harta) maupun tidak.⁸

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

⁷ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama...*, 77.

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, 1.

Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan dakwaannya oleh penuntut umum atau jaksa. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan.

Larangan hakim untuk memutuskan perkara, memutuskan terhadap orang yang dilarang menjadi saksi, seperti ayahnya, anaknya, atau istrinya, dan memutuskan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Tugas seorang hakim harus mendamaikan lebih dahulu antara pihak yang berperkara, kalau tidak bisa didamaikan baru perkara itu diperiksa menurut semestinya dan diputus sesuai dengan bukti-buktinya.

Perintah dan larangan tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Sanksi di dunia dilaksanakan oleh Imam (Khalifah) atau orang yang mewakilinya, dan sanksi tersebut menghapuskan sanksinya di akhirat.⁹

Sebelum melaksanakan hukuman atau *uqubah*, seorang hakim harusnya mengerti delik atau *jarimah* itu memiliki berbagai macam unsur yaitu adanya unsur umum dan unsur khusus. Suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun unsur *jarimah* dapat

⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, 2.

dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.¹⁰

Unsur umum *jarimah* terdiri dari unsur formiil (*al-Rukn al-Syar'iy*) yakni telah ada aturannya, (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya, (*al-Rukn al-Adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.¹¹

Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalam unsur umum *jarimah* adalah:

a. *Ar-rukun as-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang atau nash)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundang-undangkannya.

b. *Ar-rukun al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

¹⁰ Makhrus Munajat, *Transformasi...*, 20.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 12.

Unsur materiil adalah adanya perilaku seseorang yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹²

c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya muallaf)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukalaf sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*).¹³

Kedua, unsur khusus. Unsur khusus ialah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan membedakan antara jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya, pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsur-unsur yang berbeda dengan *jarimah* pencurian dengan kekerasan.

Dari uraian di atas tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur menurut hukum pidana Islam sudah memenuhi unsur-unsur delik (*jarimah*) yaitu *Ar-rukn as-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, 11.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, 53.

atau nash), *Ar-rukṇ al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum), *Ar-rukṇ al-adabi* (unsur moril, pelakunya mualaf), yang mana hukumannya termasuk dalam kategori jarimah takzir yaitu hukuman dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim/ penguasa setempat.

Maka hukuman (sanksi) bagi pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni hukuman takzir. Karena hakim sebagai penguasa telah memberi hukuman (sanksi) berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor 497/ Pid.Sus/ 2014/PN.Dum adalah mejelis hakim menjadikan pasal 332 ayat (1) KUHP sebagai dasar dalam memberikan putusan dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Majelis hakim menjatuhkan sanksi/hukuman kepada terdakwa. Namun, menurut saya, hakim kurang teliti dengan adanya *asas lex spesialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat (2) KUHP.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum adalah sesuai dengan aturan/ ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam khususnya hukum pidana Islam yaitu takzir. Takzir dalam hal ini yaitu hakim

menjatuhkan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, maka disini saya setuju atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

B. Saran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana antara praktik dan teori seharusnya berjalan beriringan atau seimbang, oleh karena itu pihak pemerintah harus membuat undang-undang yang tegas dan jelas isinya dan juga harus tegas dalam bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, begitupun instansi-instansi terkait juga harus bertindak tegas. Masyarakat juga harus ikut serta mendukung pemerintah dan aparaturnya agar tercipta negara yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Surabaya: Duta Ilmu, 2009.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, Refika Aditama, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Media, 2013.
- I Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mustakhim, *Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan yang Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 9/Pid.B/2012/PN.Mojokerto)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Putra, Lisdiana. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan No. 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis di Bawah Umur dan Membujuk Melakukan Persetubuhan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Semboda, Arip. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/PN.BKL)*. No. 1. Vol. 1. April, 2016.
- Soesilo. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yogyakarta: GAMA Press, 2008.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Trisianti, Prita Nasiti. *Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan Perempuan (Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)*. Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widianti, Ninik. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN. Dum.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p, t.t.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buana Press: 2014.

Reza Fajri Hidayat, “*Fiqh Jinayah: Jarimah Qisas dan Diyat*” dalam <http://rezafajrihidayat.blogspot.co.id/2015/06/fiqih-jinayah-jarimah-qishash-dan-diyat.html>,

Annisa Wally, “*Perbedaan antara Jarimah Hudud, Jarimah Qisas/ Diyat, dan Jarimah Ta’zir*”, dalam <http://annisawally208.blogspot.co.id/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html>